

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rusia merupakan negara terbesar di dunia. Rusia membentang dari Teluk Finlandia (bagian dari Laut Baltik) di barat ke Selat Bering (memisahkan Kutub Utara dan lautan Pasifik) di timur yang jaraknya memakan 8000 KM. Saking besarnya dikatakan bahwa negara Rusia mencakup lebih dari sepersepuluh dari permukaan tanah dunia¹. Rusia memiliki sejarah yang lumayan panjang dan dapat ditelusuri hingga lebih dari seribu tahun. Pada masa silam Rusia dipimpin oleh apa yang disebut sebagai tsar (kaisar). Namun kekuasaan kekaisaran Rusia tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1917, kekaisaran ini digeser oleh adanya revolusi rakyat yang diberi nama Uni Republic Sosialis Soviet yang lebih akrab dipanggil sebagai Uni Soviet.

Pada masa pembentukan Uni Soviet, Rusia menjadi negara bagian inti karena luas daerahnya yang besar. Pada waktu menyandang nama Uni Soviet, banyak kaum komunis yang memerintah negara ini, hingga tahun 1991². Uni Soviet dulu merupakan negara yang besar dan terdiri dari banyak negara bagian, negara ini juga ditakuti oleh sebagian negara di dunia, Uni Soviet banyak mengalami konflik berupa perang namun sebagian besar perang tersebut di menangkan oleh Uni Soviet. Hanya rival Uni Soviet pada masa itu Amerika Serikat yang mampu bersaing

¹ <http://www.kembangpete.com/tag/data-dan-deskripsi-negara-rusia/>, diakses pada 30-08-2015.

² <http://www.kembangpete.com/2014/08/25/profil-lengkap-negara-rusia/#more-9216>, diakses pada 30-08-2015 .

dengan Uni Soviet. Uni Soviet dikatakan sangat berjaya pada masa itu. Tetapi dengan sistem komunis yang dianut, kejayaan tidak selalu menjadi milik Uni Soviet, sistem komunis juga lah yang membuat Uni Soviet runtuh. Sejak Uni Soviet runtuh dan berganti nama menjadi Federasi Rusia, masyarakat Rusia mulai sibuk menata pembangunan dari segi pemerintahan dan lainnya dari sistem komunis yang gagal dibangun. Sampai saat ini Rusia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden dalam menganut sistem demokrasi yang mereka jalani. Beberapa nama telah muncul dihadapan masyarakat Rusia dan juga dunia, dimana mereka menyandang predikat sebagai Presiden Federasi Rusia. Beberapa nama seperti Boris Yeltsin, Vladimir Putin dan Dmitri Medvedev adalah orang orang yang telah memimpin Rusia hingga Rusia sekarang mendapatkan gelar sebagai salah satu negara yang kuat di dunia.

Dewasa ini, Rusia dibawah pemerintahan Vladimir Putin sejak tahun 2012 lebih aktif dalam isu-isu atau konflik internasional yang terjadi di dunia. Tidak hanya bergelut dengan isu-isu atau konflik saja, namun juga Rusia sibuk aktif dalam menjalin berbagai kerjasama internasional dengan negara negara lain. Namun, jika penulis amati Rusia disini lebih banyak melakukan kerjasama atau berkecimpung dalam isu-isu dengan negara negara yang dikatakan tidak memiliki status negara maju atau kuat, walau memang beberapa negara yang sedang diajak kerjasama sedang menuju atau menyandang status negara kuat dan maju, negara negara tersebut diantaranya India, Suriah, China, Brazil, Afrika Selatan, Palestina dan negara negara lain yang telah melakukan kerjasama dengan Rusia, dengan banyaknya kerjasama internasional atau keaktifan dalam hubungan internasional

yang dilakukan Rusia terlihat seperti ingin mengembalikan kejayaan Rusia pada masa lalu. Beberapa negara yang disebutkan diatas merupakan negara yang telah diakui, tetapi jika kita melihat nama Palestina diatas, maka kita akan bertanya tanya untuk apa Rusia melakukan kerjasama internasional dengan negara yang bahkan belum seluruh negara didunia mengakui Palestina, yang bahkan memiliki konflik dengan Israel yang didukung Amerika Serikat dan sampai sekarang belum menemukan titik penyelesaiannya. Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Putin lebih terlihat dalam menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, misalnya dukungannya terhadap konflik Palestina – Israel. Dukungan itu ditunjukkan dalam sepucuk surat yang dibacakan perwakilan Rusia saat pertemuan puncak ke-46 Liga Arab di Mesir. “Palestina mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan negara yang dapat ditinggali dengan ibu kota di Yarusalem Timur. Rusia akan tetap berusaha untuk mencapai tujuan ini melalui jalur bilateral dan multilateral,” bunyi surat Putin tersebut³.

Konflik antara Palestina dan Israel sebenarnya sudah sangat lama terjadi, menurut sejarah sudah 31 tahun konflik ini dimulai ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria sehingga pada akhirnya berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Yordania)⁴. Ada juga yang mengatakan konflik ini bermula ketika negara Arab yang menolak resolusi PBB 1947 tentang pembagian wilayah Palestina, menyerang negara Israel.

³ <http://www.satuislam.org/internasional/putin-kembali-dukung-kemerdekaan-palestina/> , diakses pada 02.24, 22 April 2015

⁴ <http://simomot.com/2014/07/14/sejarah-dan-latar-belakang-konflik-israel-palestina-dari-2000sm-sampai-sekarang/>, diakses pada 22-04-2015, 01.26 .

Jika ditilik dari lamanya dan rumitnya konflik ini bermula maka perlu diadakannya perhatian lebih pada konflik antar Palestina dan Israel. Pasalnya, konflik ini sendiri telah banyak membawa korban antara kedua belah pihak. "Jumlah warga Palestina tewas pada 2014 itu tertinggi sejak tahun 1967. Kehidupan warga Palestina, keselamatan dan kebebasannya kerap mengalami ancaman. Penderitaan 1,8 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza meningkat dan mengalami keadaan terburuk sejak 1967. Lebih dari 1.500 warga Palestina tewas pada 2014, 550 di antaranya adalah anak-anak, lebih dari 11.000 cedera dan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal," kata Kantor PBB untuk Koordinasi urusan Kemanusiaan (OCHA)⁵. Konflik yang terjadi pada tahun 2014 ini yang paling banyak menuai korban atas konflik Palestina dan Israel. Sedangkan dari pihak Israel sendiri OCHA juga mencatat beberapa korban tewas di pihak Israel. "Lima warga sipil Israel tewas, termasuk anak-anak dan petugas keamanan," kata OCHA. Dia menambahkan, jumlah korban di pihak Israel mencapai total 73 orang, kebanyakan adalah tentara⁶. Tentu jika kita melakukan perbandingan dengan melihat pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah Palestina tentu mendapat banyak kerugian dari jumlah korban yang ditimbulkan atas konflik yang terjadi pada tahun 2014 lalu.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa konflik ini merupakan salah satu konflik besar yang terjadi di dunia, banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini sebenarnya selain Israel dan Palestina. Pihak pihak tersebut dapat berupa memberikan dukungan atau malah sebaliknya, kita dapat melihat pihak-pihak yang pro terhadap

⁵ <http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-sejak-1967> , diakses pada 01.51, 22 April 2015.

⁶ <http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-sejak-1967> , diakses pada 01.51, 22 April 2015.

Palestina di berbagai media yang ada, salah satunya adalah Indonesia yang juga mengambil sikap pro terhadap Palestina. Pihak yang pro terhadap Palestina juga termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam. Selain dari negara-negara pro juga terdapat pihak oposisi yang malah mendukung Israel, salah satunya negara Amerika Serikat, seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat terang-terangan mendukung Israel pasca berlangsungnya perang di jalur Gaza. Tidak hanya dengan Palestina, sepertinya Amerika hampir tidak memberikan dukungan di negara-negara bagian Timur Tengah. Padahal Amerika juga memiliki catatan sejarah yang panjang dengan Timur Tengah. Sekitar tahun 1970-an Amerika Serikat sempat menaruh minat positif pada Timur Tengah, sehingga pada saat itu membuat beberapa kebijakan yang bernilai positif, seperti pada hal-hal berikut⁷:

- mengusahakan sumber-sumber Timur Tengah tidak jatuh ke tangan kekuatan musuh
- memelihara kemampuan destruksi unsur-unsur regional dari kekuatan strategis Amerika
- menjamin tersalurnya sumber-sumber alam Timur Tengah bagi sekutu-sekutu Amerika agar mereka tetap kuat secara ekonomis & militer
- memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan invasi dan usaha-usaha komersial Amerika
- menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen-komitmen Amerika di Timur Tengah

⁷ Kecendrungan Timur Tengah Tahun 1980-an, hal 251

- meneruskan hak transit dan “overflight” bagi pesawat-pesawat udara dan kapal laut Amerika.

Pada intinya apa yang dilakukan Amerika pada masa itu memiliki tujuan berupa mencegah rivalnya yaitu Uni Soviet untuk mendapatkan dukungan kekuatan yang mampu untuk menyeimbangkan atau menambah kekuatan dari Uni Soviet terhadap Amerika Serikat. Karena, pada saat itu Amerika menilai bahwa sekutunya yaitu Inggris dan Perancis tidak mampu untuk memainkan peran tradisional mereka di Timur Tengah, oleh sebab itu terjadilah apa yang dinamakan dengan Doktrin Trauman, dimana hal tersebut mewajibkan Amerika untuk menolong Yunani, Turki dan Iran semata-mata untuk menangkalkan imperialisme Soviet.

Padahal, jika dilihat dari sisi kemanusiaan, Palestina merupakan pihak yang memiliki nasib paling malang atas konflik ini. Selain karena mendapat korban paling banyak atas konflik, Palestina disini juga mendapat perhatian yang kurang dari kalangan internasional. Hal ini juga disebabkan Palestina sendiri belum banyak mendapat pengakuan oleh seluruh negara sebagai sebuah negara yang merdeka, terlebih lagi PBB yang merupakan organisasi internasional yang biasanya memberikan bantuan mengenai kemanusiaan terbesar didunia juga hanya memberikan sedikit perhatiannya terhadap Palestina, dikarenakan Palestina sendiri belum mendapat status anggota yang jelas dalam PBB serta pengaruh Amerika Serikat yang kuat dalam PBB dimana Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto dalam PBB dan merupakan salah satu negara yang juga pro terhadap Israel atas konflik Palestina-Israel.

Namun, ditengah sedikitnya perhatian yang diberikan oleh kalangan internasional terhadap Palestina, Rusia yang merupakan salah satu dari 5 negara besar anggota PBB serta anggota penuh dari dewan keamanan PBB malah menyatakan dukungan penuh atas Palestina. Rusia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin dimana sekarang merupakan periode ketiga beliau menjabat sebagai Presiden di Rusia, menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Jika dilihat dari banyaknya catatan sejarah, Rusia dan Palestina tidak terlalu memiliki catatan sejarah yang lumayan banyak atau berpengaruh pada masing masing negara. Tetapi meskipun begitu, kedua negara ini rupanya pernah memiliki hubungan sejarah sejak lama. Uni Soviet mulai aktif di Timur Tengah dan masuk ke dunia Arab sekitar pertengahan dasawarsa tahun 1950-an. Sama dengan tujuan Amerika yang telah dijelaskan sebelumnya, Uni Soviet pada masa itu ingin menyebarkan paham anti-barat karena pada masa itu Soviet masih berselisih dengan Amerika sehingga Soviet ingin melenyapkan posisi dan pengaruh Amerika di mana saja di dunia ini dan akhirnya Soviet harus menggantikan kedudukan dan pengaruh Amerika tersebut⁸. Uni Soviet di Palestina sendiri juga memiliki sejarah tersendiri, namun pada masa itu Soviet tidak memberikan dukungan yang full terhadap Palestina. Tetapi, setelah pemimpin PLO beralih ke Yasser Arafat, Rusia kembali menyatakan dukungan penuh kembali kepada Palestina sendiri. Setelah hal ini, dukungan Rusia terhadap Palestina masih mengalami pasang surut. Namun, setelah Uni Soviet runtuh dan berganti nama menjadi Rusia dibawah pemerintahan Presiden Boris Yeltsin, Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev, Rusia secara konstan mendukung Palestina

⁸ Kecendrungan Timur Tengah Tahun 1980-an, hal 315

dalam berbagai hal terutama dalam konfliknya dengan Israel. Contoh lainnya Rusia mendukung Proses Perdamaian Timur Tengah dan kesepakatan Oslo tahun 1993. Terlebih, pada masa pemerintahan Vladimir Putin, beliau begitu gencar menyatakan kepeduliannya terhadap Palestina, bahkan tidak hanya Palestina namun juga negara-negara yang berada di Timur Tengah. Rusia pada masa Vladimir Putin juga menyatakan bahwa mereka siap membantu Palestina mendapatkan kenaikan status di PBB. Selain itu bantuan lainnya yang diberikan oleh Rusia terhadap Palestina seperti Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan Rusia akan mendukung resolusi penyusunan ketentuan untuk menarik tentara Israel dan pembentukan negara Palestina jika resolusi itu diajukan pada Dewan Keamanan PBB. Namun para ahli Timur Tengah cenderung pesimis. Meski mendapat dukungan Moskow, Dewan Keamanan belum tentu akan menerima resolusi tersebut karena akan ditentang oleh AS. Rusia bersedia mendukung delegasi Palestina di PBB yang berencana mengajukan resolusi pada Dewan Keamanan. Resolusi tersebut akan menetapkan ketentuan-ketentuan konkret untuk pembentukan negara Palestina dan penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. Wakil Tetap Rusia Vitaly Churkin menyatakan, "Jika resolusi diajukan, kami akan mendukungnya"⁹. Dengan melihat beberapa media atau info mengenai sikap Rusia yang pro terhadap Palestina, penulis tertarik untuk membahas hubungan antara Rusia dan Palestina terutama pada masa Vladimir Putin, dimana beliau merupakan orang yang telah tiga kali menjabat sebagai Presiden di Rusia dan pada masa

⁹http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/propalestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647.html , diakses pada 02.45, 22 April 2015

pemerintahannya ini beliau menunjukkan sikap Pro-Palestina secara terang-terangan, meski hubungan Rusia sendiri dengan rival Palestina selama ini yaitu Israel tetap baik baik saja . Berikut pernyataan dari Kepala Kolaborator Ilmiah di RAS Institute of World Economics and International Relations Georgy Mirsky, dimana ia meyakini bahwa pernyataan Rusia yang pro-Palestina tak akan berdampak pada hubungan dengan Israel karena hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap situasi nyata. "Israel maklum jika Rusia mendukung Palestina. Hampir seluruh dunia mendukung Palestina, lalu apa? Ini semua hanya permainan, karena situasi nyata di Palestina terjadi di lapangan, bukan di lorong-lorong gedung PBB, dan hal itu tidak akan berubah. Israel tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina yang sepenuhnya merdeka karena berbagai alasan, di antaranya terkait status Yerusalem Timur, isu permukiman, masalah pasukan Israel di perbatasan dengan Yordania, serta jutaan pengungsi yang siap berhamburan masuk ke wilayah Palestina. Netanyahu hanya akan menerima negara Palestina yang lebih kecil dan terbatas, tapi tidak akan ada pemimpin Arab yang mendukung itu," terang Mirsky¹⁰. Melihat pernyataan seperti ini, penulis makin tertarik untuk membahas mengenai kebijakan yang telah diambil oleh Rusia yang pro akan Palestina, hal ini menunjukkan seolah-olah Rusia memiliki suatu kepentingan akan sikap tersebut, karena jika dilihat dari pernyataan Georgy Mirsky bahwa Rusia memiliki suatu kepentingan terhadap Palestina, tidak sekedar memiliki niat membantu, namun juga memiliki kepentingan.

¹⁰http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/propalestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarik_an_pasukan_israel_da_25647.html , diakses pada 22 April 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas, maka penulis menarik pertanyaan berupa “Mengapa pada masa pemerintahan Vladimir Putin sejak tahun 2012 Rusia lebih menunjukkan sikap Pro-Palestina?”

C. Landasan Teori/ Konsep

- Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu konsep atau teori dasar dari suatu Ilmu Hubungan Internasional, karena pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu mengenai bagaimana hubungan antar negara, baik itu berasal dari individu, kelompok atau organisasi atau dari perangkat negaranya sendiri. Kebijakan luar negeri digunakan sebagai dasar dari bagaimana suatu negara bertindak. Definisi umum dari kebijakan luar negeri ialah seperangkat formula, nilai, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam perbatasan dunia internasional¹¹. Banyak tokoh dunia yang memberikan sumbangsuhnya terhadap teori kebijakan luar negeri. Mereka memberikan deskripsi dari kebijakan luar negeri berdasarkan perspektif mereka masing masing. Berikut merupakan beberapa paparan definisi kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh beberapa ahli:

- Plano dan Olton (1999) mengungkapkan dalam Kamus Hubungan Internasional bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi atau

¹¹ http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-110468-Perbandingan%20Politik%20Luar%20Negeri-KONSEP%20KEBIJAKAN%20LUAR%20NEGERI%20%20DAN%20PERKEMBANGAN%20STUDI%20KEBIJAKAN%20LUAR%20NEGERI.html , diakses pada 06 Mei 2015

rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional secara spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

- K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan. Dalam konstruksi sosial beberapa faktor dapat menjadi pengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, seperti kepribadian pemimpin, lingkungan dalam negeri, politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan opini publik.
- Stephen Walker dan Mark Schafer, kepercayaan sebagai disposisi internal yang terletak dalam diri individu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri¹², faktor kepribadian dan keyakinan para pemimpin, gaya kepemimpinan, emosi, gambar, konsistensi kognitif, dan penggunaan analogi mempengaruhi bentuk keputusan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman

¹² Alex Mintz, Karl DeRoune Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, 2010, New York, Cambridge Press, hlm.102.

yang ada. Karena kebijakan luar negeri sangat tergantung dengan bagaimana posisi sebuah negara yang menerapkan kebijakan luar negerinya.

Dengan melihat berbagai penjelasan diatas, secara umum dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri sendiri merupakan suatu strategi atau rencana atas suatu tindakan atau *action* yang dibuat dan dilakukan oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara atau unit politik internasionalnya, setelah kebijakan yang dibuat itu terbentuk maka selanjutnya akan dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dari negara pembuat kebijakan dengan dasar kepentingan nasional negara tersebut¹³. Untuk mencapai kepentingan nasional ini hal hal yang digunakan biasanya banyak dalam bentuk kerjasama, baik itu secara bilateral atau multilateral.

Dalam kasus ini, penulis mengambil pengertian kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya¹⁴. Lebih spesifik, kebijakan luar negeri identik di tujukan kepada segala sesuatu yang berada di luar suatu negara. Selain memperhitungkan kondisi internal suatu negara, penyusunan kebijakan luar negeri juga perlu mempertimbangkan kondisi eksternal negara yaitu sistem global atau internasional. Kebijakan luar negeri dapat berupa reaksi dari apa yang terjadi

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal 5.

¹⁴ James, N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27.

dalam sistem internasional¹⁵. Selain dari faktor internal dan eksternal yang ada, Rosenau menambahkan bahwa ada variabel tambahan yaitu variabel individu *decision maker* yang dimana merupakan kepala negara pemerintahan, corak kebijakan yang terbentuk akan ditentukan dari kesan, persepsi serta karakteristik pribadi si kepala negara. Ada lima sumber yang mempengaruhi kebijakan luar negeri antara lain¹⁶:

1. Idiosinkretik, berhubungan dengan karakteristik individu dari pembuat keputusan.
2. Governmental, yang dimana merupakan faktor pemerintahan.
3. Societal, yaitu faktor masyarakat negara tersebut.
4. Peran, dari pembuat keputusan tersebut.
5. Sistemik, yaitu sistem secara keseluruhan.

Menurut Rosenau apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal berserta eksternalnya seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa¹⁷.

¹⁵ Soeprapto. 1997. Ilmu Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku. PT Raja Grafindo Persada

¹⁶ James N. Rosenau. 1980. "The Scientific Study of Foreign Policy". Nichols Publishing Company: New York. Hlm 252.

¹⁷ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

James N Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

Selain itu, kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:

- Kebijakan luar negeri sebagai orientasi (*as a cluster of orientation*), maksudnya sebagai orientasi ialah sebagai pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan serta dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
- Sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Disini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan luar negeri.
- Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berada dalam tindakan yang

lebih empiris, yaitu berupa langkah – langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik¹⁸.

Analisa yang dilakukan disini memfokuskan pada hubungan yang terjadi antara Rusia dan Palestina, Rusia memang sudah menaruh perhatian dan simpatik terhadap Palestina sejak lama. Namun, sejak Vladimir Putin menjabat untuk ketiga kalinya sebagai Presiden Federasi Rusia sejak tahun 2012, dukungan terhadap Palestina secara terang ditunjukkan kepada dunia. Dengan melihat pengertian awal dari kebijakan luar negeri yang dinyatakan oleh Rosenau, dengan dilakukannya kebijakan luar negeri maka pihak yang memiliki kebijakan memiliki tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Dengan melihat pengertian yang dijabarkan seperti itu dan melihat hubungan antar dua negara yang terbentuk maka akan muncul pertanyaan apa keuntungan yang akan didapat dari pihak Rusia dengan memberikan dukungan simpatiknya kepada Palestina padahal Palestina merupakan negara yang dikatakan biasa biasa saja, memiliki konflik yang belum selesai dan bahkan belum diakui sebagai negara oleh seluruh negara yang ada didunia. Jika kita kaji lagi Rusia merupakan negara yang besar, kekuatan militer dan ekonomi dari Rusia juga tidak main main, kekuatan individu Rusia dapat dikatakan mandiri dan kokoh.

¹⁸ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri dapat dibentuk dari reaksi yang diciptakan oleh apa yang terjadi di dunia. Disini Rusia bereaksi dari apa yang terjadi dalam dunia internasional, sesuai dengan pembahasan disini maka Rusia merespon isu-isu yang ada di negara Palestina, seperti konflik yang ada di Palestina dengan Israel yang sampai saat ini belum selesai sepenuhnya. Rusia bereaksi kebanyakan dengan memberikan dukungan kepada Palestina. Dukungan tersebut secara penuh diberikan melalui sepucuk surat yang berasal dari Presiden Vladimir Putin pada Liga Arab ke-46 yang menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina dan dukungan untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai. Rusia juga merespon isu pengakuan serta kemerdekaan negara Palestina, disini Rusia terlihat memberikan respon berupa dukungan kembali terhadap apa yang dialami oleh Palestina. Palestina disini banyak mengalami penolakan dari beberapa negara didunia terkait dengan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara.

Cuma segelintir negara-negara didunia yang mengakui bahwa Palestina merupakan sebuah negara, Rusia disini bereaksi terhadap isu ini dan memberikan suara sebagai salah satu yang mengakui Palestina sebagai negara sebagai dukungannya ke Palestina. Tidak tanggung-tanggung Rusia memberikan dukungannya terhadap delegasi Palestina di PBB yang hendak mengajukan resolusi tentang penetapan ketentuan-ketentuan konkret untuk pembentukan negara Palestina serta penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. “ Jika resolusi diajukan, kami akan mendukungnya” tegas Vitaly Churkin yang merupakan wakil tetap Rusia. Sikap dukungan ini tidak hanya sekali, namun sudah lama Rusia mendukung gagasan pendirian negara Palestina yang merdeka dan diplomat Rusia telah berulang kali menyatakan sikap

ini secara terbuka. "Kami percaya bahwa perjuangan bagi Palestina adalah hal yang adil untuk dilakukan dan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk mendirikan negara mereka sendiri," kata Perwakilan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah Mikhail Bogdanov di Kairo pada pertengahan Oktober, dalam sebuah pertemuan mengenai rekonstruksi Jalur Gaza¹⁹. Dengan melihat ini Rusia terlihat aktif dalam isu-isu yang ada di Palestina, dua isu Palestina di atas cukup besar mewakili apa yang terjadi di Palestina. Tidak hanya Palestina sebenarnya namun juga terhadap negara-negara disekitarnya.

Namun, kebijakan ini tidak tercipta dengan sendirinya, tidak hanya dengan memberikan reaksi atas apa yang terjadi di Palestina. Tentu ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri ini. Seperti yang telah disebutkan oleh James N. Rosenau bahwa kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh variabel individu *decision maker* dimana yang berperan dalam hal ini adalah kepala negara pemerintahan sendiri, yaitu Presiden Rusia yang menjabat, Vladimir Putin. Vladimir Putin memang dikenal sebagai pahlawan oleh masyarakat Rusia, mereka tahu bagaimana besarnya peran Putin, terutama atas konflik yang terjadi dalam masa pemerintahan pendahulunya, Boris Yeltsin. Selain itu Putin dikenal berani, pintar dan cerdas. Karena Putin lah Rusia sekarang bisa menjadi negara yang dipandang seperti dulu saat Rusia masih menyandang nama Uni Soviet.

¹⁹http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/propalestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarik_an_pasukan_israel_da_25647.html, diakses pada 22 April 2015

Presiden Vladimir Putin sedikit demi sedikit mulai mengembalikan apa yang dimiliki Rusia saat masih menjadi Uni Soviet. Pada awal masa pemerintahannya Putin banyak membereskan masalah yang ditinggalkan oleh Boris Yeltsin, baik itu mulai dari konflik internal, pembangunan, serta ekonomi, hingga akhirnya Rusia berhasil melepaskan diri dari hutang yang menumpuk. Putin juga dikenal sebagai salah satu orang yang anti terhadap kebijakan barat. Putin merupakan salah satu orang yang berani menantang atau mengkritik kebijakan barat. Jika melihat dari sifat ambisius serta kecerdasan Putin dalam mengatur Rusia hingga menjadi seperti sekarang ini maka tujuan Putin dapat terlihat jelas yaitu ingin Rusia menjadi negara yang besar, kuat dan independen. Dan memang, Putin juga memiliki tujuan untuk mengembalikan kejayaan Rusia seperti pada saat Rusia menyandang nama sebagai Uni Soviet. Saat baru menjabat, Putin pernah membuat pernyataan untuk “mengembalikan kejayaan Rusia”. Merupakan pernyataan yang kontroversial sebagai pemimpin baru, karena pernyataan Putin itu dibuat hanya sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Rusia²⁰.

Hal ini dengan jelas menyatakan bahwa selama ini yang dilakukan Putin adalah untuk menjadikan Rusia kembali menjadi negara besar yang dipandang. Sebagai orang awam, Rusia dapat kita katakan sudah berjaya, kemampuan ekonomi mereka, sistem pemerintahannya, militer yang mereka miliki. Namun, masih kurangnya negara negara yang bekerja sama, pada saat masih menyandang nama Uni Soviet banyak negara yang menjadi negara bagian Uni Soviet, tetapi ketika Uni Soviet

²⁰ <http://alterpolitika.com/berita-putin-dan-kejayaan-rusia.html#ixzz3kJBp2qIe>, diakses pada 31 Agustus 2015

runtuh, negara negara bagian itu pecah dan mulai memerdekakan diri mereka. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh Uni Soviet pada saat menjadi negara yang besar. Putin berusaha untuk mendapatkan kembali hal itu, terlihat dari banyaknya kerjasama yang dilakukan pada masa pemerintahan Vladimir Putin terhadap negara negara lain. Banyak dukungan yang diberikan oleh Vladimir Putin, dalam pembahasan ini salah satunya adalah Palestina. Putin juga menyelaraskan cara Rusia memikat negara negara lain untuk melakukan kerjasama, dengan menggunakan soft power, dimana kita tahu bahwa dewasa ini hard power tidaklah lagi pantas untuk digunakan. Dengan menghimpun kekuatan kekuatan untuk bekerja sama, Putin berharap dapat membuat Rusia kembali menjadi negara besar yang dipandang.

D. Hipotesa

Dengan melihat sikap Rusia yang lebih memperlihatkan dukungan terhadap Palestina pada masa pemerintahan Vladimir Putin yang ketiga, maka hipotesa yang dapat ditarik oleh penulis adalah:

- Rusia berusaha menarik perhatian dan dukungan Palestina, sebagai strategi mengumpulkan dan memberikan pengaruh negara negara yang ada di Timur Tengah agar menjadi salah satu great power yang berperan sebagai penyeimbang kekuatan didunia.
- Rusia ingin terlihat lebih aktif dalam hubungan internasional dengan cara merespon berbagai isu dan konflik internasional dalam hal ini terhadap isu-isu dan konflik yang ada di Palestina.

E. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui alasan atau faktor faktor yang mempengaruhi tindakan Rusia dalam membela Palestina.
- b) Mengetahui kebijakan kebijakan yang telah dilakukan Rusia upaya membantu Palestina tidak hanya konflik dengan Israel semata namun juga status Palestina dimata dunia.
- c) Sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian:

1. Metode Kualitatif, merupakan metode yang ditujukan untuk menjelaskan peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, baik secara individu ataupun kelompok. Penelitian ini bersifat deskriptif.
2. Metode penelitian memuat analisa penulis, penulis tidak langsung terjun ke lapangan untuk mencari data, tetapi melakukan *study literature* demi memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah yang dirumuskan.
3. Deduktif yang berarti penulis berangkat dari suatu teori, konsep yang kemudian dilanjutkan dengan pencarian data data.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi jangkauan penelitian dimulai dari tahun 2012 hingga tahun ini. Dimana pada tahun 2012, Rusia dalam pengawasan Presiden Vladimir Putin lebih menunjukkan sikap aktif dan peduli terhadap isu-isu dan konflik yang ada di Palestina.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan penelitian kedalam lima bab yang dimana pada masing masing bab akan menjelaskan mengenai:

- Bab I akan membahas mengenai Pendahuluan, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, konsep teori, hipotesa, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II, penulis akan memaparkan penjelasan mengenai bagaimana Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia secara general. Dimulai dari kebijakan luar negeri Uni Soviet, hingga Kebijakan Luar Negeri Rusia dibawah pemerintahan Boris Yeltsin, Vladimir Putin serta Dmitri Medvedev secara umum.
- Bab III, penulis akan memaparkan mengenai Palestina serta isu dan konflik besar yang terjadi didalamnya.
- Bab IV, penulis akan memaparkan penjelasan mengenai hubungan antara Rusia dan Palestina terkait dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
- Bab V, penulis akan menuliskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.